

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, D.A., 2009, Analisis Penghitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (Studi Kasus pada PT Tirta Jaya), *Skripsi* (Tidak Diterbitkan), Universitas Sanata Dharma Yogyakarta: Fakultas Ekonomi.
- Anonim, 2021, "Masyarakat Keberatan dengan Pajak Pulsa," Diakses dari <https://www.youtube.com/watch?v=IzJcWqflwyE> pada Tanggal 21 November 2022.
- Budihardjo, O. dan Nurjanah, R.M., 2021, "Aturan PPh dan PPN Penjualan Pulsa, Kartu Perdana, Token dan Voucher", Diakses dari <https://www.konsultanpajak-surabaya.com/aturan-pph-dan-ppn-penjualan-pulsa-kartu-perdana-token-dan-voucher> pada Tanggal 10 November 2022.
- Dotulong, S. Pangemanan, S.S., Sabijono, H., 2014, "Penerapan Akuntansi untuk Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pada PT Bank Mandiri (Persero) TBK Cabang Dotulolong Lasut," *Jurnal EMBA*. 2 (1). 457 – 468.
- Fatihudin, D., 2014, "Urgensitas Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Implementasinya dalam 'Pasar' Industri Keuangan dan Perti Ekonomi", *Equilibrium*, 12 (2), 167 – 171.
- Hanjarwadi, W., 2022, "Mengenal Restitusi Pajak dan Syarat Pengajuannya," Diakses dari <https://www.pajak.com/pajak/mengenal-restitusi-pajak-dan-syarat-pengajuannya/> pada Tanggal 9 November 2022.
- Hanjarwadi, W., 2022, "Mengenal Restitusi Pajak dan Syarat Pengajuannya", Diakses dari <https://www.pajak.com/pajak/mengenal-restitusi-pajak-dan-syarat-pengajuannya/> pada Tanggal 9 November 2022.
- Hidayat, R., 2020, "Pengaturan Sanksi Pidana Tak Boleh Dituangkan dalam Aturan Turunan," Diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/pengaturan-sanksi-pidana-tak-boleh-dituangkan-dalam-aturan-turunan-lt5faa40f053a07> pada Tanggal 18 November 2022.
- Isnantiana, N.I., 2019, "Hukum dan Sistem Hukum Sebagai Pilar Negara," *JHES: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, 2 (1), 19 – 35.
- Isnantiana, N.I., 2019, "Hukum dan Sistem Hukum Sebagai Pilar Negara", *JHES: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, 2 (1), 19 – 35.
- Kardiyati, E.N. dan Karim, A., 2020, "Analisis Restitusi Pajak Pertambahan Nilai pada Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP Cirebon Tahun 2016–2018)," *BALANCE : Economic, Business, Management, and Accounting Journal*, XVII (2), 87 – 94.

- Kartikahadi, H., Sinaga, R.U., Syamsul, M., Siregar, S.V., Wahyui, E.T., 2016, *Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis SAK Berbasis IFRS*, Buku 1, Jakarta: Salemba Empat.
- Mardiasmo, 2016, *Perpajakan*, Edisi Revisi, Yogyakarta: Penerbit Andi.
- MSS Consultant, 2021, “Menjawab Polemik Pajak Pulsa, Kartu Perdana, Token, dan Voucher”, Diakses dari <https://mssconsultant.com/postingan-3-menjawab-polemik-pajak-pulsa-kartu-perdana-token-dan-voucher> pada Tanggal 10 November 2022.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2022 tentang Faktur Pajak.
- Prayoga, F., 2021, “Pemungutan Pajak ke Pulsa dan Kartu Perdana Dinilai Menghambat Transformasi Digital”, Diakses dari <https://economy.okezone.com/read/2021/01/30/320/2353382/pemungutan-pajak-ke-pulsa-dan-kartu-perdana-dinilai-menghambat-transformasi-digital> pada Tanggal 9 November 2022.
- Putri, D.H. dan Wijaya, S., 2022, ”Pajak Pertambahan Nilai Final: Belajar dari Ghana dan China,” *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara*, 3 (2), 360-374.
- Resmi, S., 2017, *Perpajakan Teori dan Kasus*, Buku 1, Edisi 10, Jakarta: Salemba Empat.
- Riahi, A. dan Belkaoui, (2006). *Teori Akuntansi*. Edisi 5. Buku 1. Terjemahan Ali Akbar, Yulianto dan Risnawati Dermauli. Jakarta: Salemba Empat.
- Sadeli, L.M. (2009). *Dasar-Dasar Akuntansi*. Edisi Satu. Cetakan Ketiga. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Sayekti, I.M.S., 2021,. “Signifikasi Pemajakan Pulsa Ponsel,” Diakses dari <https://analisis.kontan.co.id/news/signifikasi-pemajakan-pulsa-ponsel> pada Tanggal 9 November 2022
- Setiadi, 2022, ”Harmonisasi UU HPP Perpajakan Indonesia dengan Tax Center Jilid 2, *Jurnal Bisnis dan Akuntansi Unsurya*, 7 (1), 17 – 30.
- Soemarso, S.R., 2007, *Perpajakan Pendekatan Komperhensif*, Jakarta: Salemba Empat.
- Suasa, M.D.S., Arjaya, I.M., I Seputra, I.P.G., 2021, “Asas Keadilan Pemungutan Pajak dalam Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan,” *Jurnal Preferensi Hukum*, 2 (1), 6 – 10.
- Suasa, M.D.S., Arjaya, I.M., I Seputra, I.P.G., 2021, “Asas Keadilan Pemungutan Pajak dalam Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan,” *Jurnal Preferensi Hukum*, 2 (1), 6 – 10.

- Sugiyono, 2017, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta.
- Sukardji, U., 2015, *Pokok-pokok PPN (Pajak Pertambahan Nilai) Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press.
- Suoth, C., Morasa, J., Tirayoh, V., 2022, "Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Minahasa," *Jurnal EMBA*, 10 (1), 917 – 925.
- Syafitri, N.A., 2020, Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT. Varia Usaha Beton, *Skripsi* (Tidak Diterbitkan), Universitas Muhammadiyah Surabaya: Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
- Syahputra, M.W., 2018, "Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Perusahaan Daerah (PD) Pembangunan Kota Medan, *Skripsi* (Tidak Diterbitkan), Universitas Sumatera Utara: Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.
- Waluyo, 2017, *Perpajakan Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat.
- Warsito dan Samputra, P.L, 2020, "Potensi Penurunan Pajak dan Strategi Kebijakan Pajak untuk Mengantisipasi Dampak Pandemi Covid-19: Perspektif Ketahanan Nasional", *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, 11 (2), 93 – 108.
- Whaskita, S., 2013, Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Indoprima Gemilang, *Skripsi* (Tidak Diterbitkan), Universitas Wijaya Putra Surabaya: Fakultas Ekonomi.
- Widyastuti, A.Y., 2020, "Penerimaan Pajak Capai Rp 1.069,98 Triliun atau 89,25 Persen dari Target", Diakses dari <https://bisnis.tempo.co/read/1440165/2020-penerimaan-pajak-capai-rp-1-06998-triliun-atau-8925-persen-dari-target> pada Tanggal 10 November 2022.
- _____, 2021, "Sajak Pulsa Diterapkan per 1 Februari, Bagaimana Dampak ke Operator Seluler?", Diakses dari

https://bisnis.tempo.co/read/1427964/pajak-pulsa-diterapkan-per-1-februari-bagaimana-dampak-ke-operator-seluler?page_num=2 pada Tanggal 10 November 2022.

Yusuf, O., 2021, "Orang Indonesia Rata-rata Menghabiskan Kuota Internet Sebesar Ini Tiap Bulan," Diakses dari <https://tekno.kompas.com/read/2021/08/09/11100087/orang-indonesia-rata-rata-menghabiskan-kuota-internet-sebesar-ini-tiap-bulan> 3–4 minutes pada Tanggal 9 November 2022.